

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2018



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid

Telp. (0293) 788003-788004 Fax (0293) 789257

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Perubahan Renja ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak Lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.

Dan harapan kami semoga Perubahan Renja ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca. Untuk ke depannya dapat memperbaiki isi dari Dokumen ini agar menjadi lebih baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan dokumen ini.

Kota Mungkid, 26 Oktober 2018

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Evaluasi Renja ssampai dengan Triwulan 2	i
Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	ii

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan Daerah pada umumnya. Renja Perubahan SKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perubahan SKPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perubahan SKPD berperan penting dalam setiap kinerja suatu SKPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Proses penyusunan Renja Perubahan SKPD dimulai dengan usulan dari setiap Bidang yang perencanaan berubah sehingga diperlukan perubahan dalam program maupun kegiatan. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan Review Evaluasi Renja SKPD bulan yang telah lalu serta mengacu pada Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan Perubahan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan didalam Perubahan Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah kami sepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Perubahan Renja SKPD memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu

indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 152 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sementara dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa:

1. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

2.2. Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
14. Intruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006

- tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2025;
 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD.
 20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD.

2.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2018 adalah untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen suatu perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode satu (1) tahun yang dimulai tanggal 01 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD adalah melaksanakan Tugas dan Fungsinya.

2.4. Dasar Pertimbangan dan Perubahan

Dasar pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Keadaan yang mengakibatkan penambahan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

- b. Adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.
- c. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2018.

2.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2018 dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD. Dalam Proses penyusunan Perubahan Renja juga melibatkan seluruh bagian dan sub bagian dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Sekretariat DPRD, yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam rapat Badan Musyawarah dan Rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renja. Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2018 sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- Bab II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
 - 2.1 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan s.d TW II Tahun 2018
 - 2.2. Permasalahan

- Bab III : RENCANA KERJA
 - 3.1. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2018

- BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Tahun
2018

2.1. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan s.d TW II Tahun 2018

Hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam Tabel 2.1, yang terdiri dari 10 program dan 31 kegiatan, realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar 53,07%. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 10 kegiatan, capaian kinerja 32,89%. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin sebagai penunjang pencapaian kinerja pelayanan. Program ini terdiri dari kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana yang terdiri 6 kegiatan, capaian kinerja 29,30%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana beserta pemeliharaannya. Dalam Program ini terdiri dari Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala peralatan Gedung Kantor, dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rutin/Berkala Mebeulair
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari satu kegiatan, capaian kinerja 1,03 %. Kegiatan ini merupakan pemenuhan akan kebutuhan Pakaian Dinas Dewan.

- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri satu kegiatan, capaian kinerja 31,81%. Kegiatan ini merupakan kegiatan bimbingan teknis PNS Sekretariat DPRD, dimana sebagian besar kegiatan adalah mendampingi Dewan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri satu kegiatan, capaian kinerja 50,31%.Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengelola pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri 8 kegiatan, capaian kinerja 59,60%. Kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Magelang. Dalam program ini terdiri dari dari Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD, Kegiatan Rapat Paripurna DPRD, Kegiatan Kegiatan Reses DPRD, Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, Kegiatan Pendampingan Pembahasan LKPI, Kegiatan Peningkatan Kinerja Sekretariat Fraksi, Kegiatan Tunjangan Transportasi, dan Kegiatan Tunjangan Perumahan.
- g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari satu kegiatan, capaian kinerja 0%. Kegiatan yang mengelola aset Sekretariat DPRD
- h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari satu kegiatan, capaian kinerja 21,90%. Kegiatan yang mengolah, menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD.
- i. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa terdiri dari satu kegiatan, capaian kinerja 5,06%. Kegiatan yang mengampu kerjasama informasi dengan mass media.

2.2 Permasalahan

Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program / kegiatan.

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian;
2. Rendahnya pengetahuan karena kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diikuti;

3. Kurangnya Apresiasi Kerja baik itu *reward* atau *punishment* dari unsur pimpinan sehingga motivasi dan disiplin kerja aparat rendah;
 4. Kurang memahami SOP yang sudah ditetapkan oleh Sekretaris DPRD
 5. Kurangnya profesionalisme ditingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi.
 6. Terjadinya mis komunikasi antara Sekretariat dan DPRD tentang pemahaman dan pelaksanaan peraturan dan perundang-undang yang digunakan.
 7. Kurang tertib penyampaian materi-materi rapat yang diserahkan untuk anggota DPRD
 8. Jumlah dan ketersediaan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
 9. Koordinasi dan sinkronisasi yang tidak harmonis di pimpinan DPRD, alat kelengkapan, dan komisi, membawa dampak pada kinerja sekretariat DPRD menjadi terganggu.
 10. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
 11. Kurang disiplin nya anggota DPRD menjadikan kendala dalam penyelesaian tugas dan pertanggungjawaban kegiatan.
- Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.
 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM DPRD dan Staf Sekretariat DPRD sesuai kompetensi dan kebutuhan;
 2. Standar fungsi pengawasan yang baik untuk mengawasi SKPD sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan apa yang direncanakan;
 3. SKPD dapat bekerjasama dengan baik dengan DPRD sehingga dalam proses penganggaran dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan kegiatan yang menjadi program kerja SKPD terkait;
 4. Adanya kerja sama yang baik dalam proses pembuatan PERDA baik itu anggota DPRD khususnya BANLEG dengan tim yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sehingga Perda yang digarap dapat cepai selesai;
 5. Pemantauan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu; sosialisasi yang intensif perlu diupayakan terutama untuk hal -hal/informasi terbaru atau peraturan - peraturan terbaru yang bersifat top down;
 6. Pentingnya rekrutment pegawai berdasarkan tingkat kebutuhan instansi;

7. Dukungan dan bantuan semua pihak agar seluruh pelaksanaan kegiatan dapat terwujud dengan baik.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018

Jumlah kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 sebanyak 32 Kegiatan, kegiatan yang tidak mengalami perubahan sebanyak 15 kegiatan, kegiatan yang mengalami perubahan sebanyak 18 Kegiatan, sedangkan tambahan kegiatan sebanyak satu kegiatan yaitu Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, sehingga jumlah seluruh kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD sebanyak 33 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang tidak mengalami perubahan :
 1. Penataan dan Pemetaan Dokumen/Arsip
 2. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 5. Penyediaan Makanan dan Minuman
 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
 11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya
 12. Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD
 13. Pembahasan LKPJ
 14. Kajian Tunjangan Perumahan
 15. Pengelolaan Aset

- b. Kegiatan yang mengalami perubahan (Penambahan /Pengurangan)
 1. Penyebarluasan Informasi DPRD (Bertambah)
 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bertambah)
 3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Berkurang)
 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Berkurang)
 5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Bertambah)
 6. Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran (Bertambah)
 7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Bertambah)
 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Bertambah)
 9. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Berkurang)
 10. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Berkurang)

11. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Berkurang)
12. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Berkurang)
13. Rapat Paripurna (Berkurang)
14. Reses DPRD (Berkurang)
15. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD (Bertambah)
16. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (Berkurang)
17. Peningkatan Kinerja Sekretariat Fraksi (Bertambah)
18. Penyusunan Renja SKPD (Bertambah)

Adapun rencana perubahan program dan kegiatan tahun 2018 dapat dilihat di Lampiran 3.1

BAB. IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebagai bahan dalam penyusunan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lau. Dokumen Perubahan Rencana Kerja selanjutnya digunakan sebagai perdoman penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2018.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kab. Magelang Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasikan sinergik serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang maupun dengan dengan instansi terkait langsung.

Kota Mungkid, Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG

ISWIYATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19730706 199303 2 005

TABEL 2.1
Formulir Terhadap Evaluasi Hasil Renja SKPD
Renja SKPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG
Periode Pelaksanaan : Tahun 2018 Triwulan 2

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD: Dapat mewujudkan kondisi Prima dengan upaya-upaya penguatan organisasi atau kelembagaan dan dapat mewujudkan perubahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi, efisiensi, efektivitas serta jelas kode etikny

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra SKPD) (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 - 12		15 = 14/5 x 100						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi bagi DPRD	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																												
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Outcome : Jumlah Surat Yang dikelola Output: Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.610 surat	79,712,865	4,575	30,641,325	2510 surat	14,288,000	590	Rp.	-	479	Rp.	3,834,000					1,069	Rp.	3,834,000	42.59	26.83	5,644	Rp.	34,475,325	70.00	43.25	Sekretariat DPRD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome : Tercukupinya Telepon,Air Listrik Output: Cakupan Pelayanan Administrasi	4 kegiatan	1,333,291,998	3 kegiatan	232,535,356	3 kegiatan	216,600,000	3	Rp.	-	3	Rp.	27,834,732					3	Rp.	27,834,732	50.00	12.85	3	Rp.	260,370,088	75.00	19.53	Sekretariat DPRD	
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Outcome : Terjaminnya Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga Output: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0%	-	0	95,949,075	50 Anggota Dewan	42,704,000	0	Rp.	-	0	Rp.	-	Rp.	-			-	Rp.	-	-	0.00	-	Rp.	95,949,075	65.00	55.00	Sekretariat DPRD	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Administrasi Keuangan yang tersedia Output: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 kegiatan	450,661,920	4 kegiatan	140,915,350	4 kegiatan/Bulan	94,803,000	0	Rp.	-	7	Rp.	21,467,350					7	Rp.	21,467,350	25.00	22.64	4	Rp.	162,382,700	80.00	36.83	Sekretariat DPRD	
	Penyediaan Peralatan Dan Perengkapan Kantor	Outcome : Jumlah Plaket yang dibeli Output: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	750 plaket	134,472,150	375 plaket	39,917,500	130 plaket	27,155,500	0	Rp.	-	130	Rp.	23,350,000		Rp.	-	Rp.	-	130	Rp.	23,350,000	100.00	85.99	635	Rp.	63,267,500	85.00	47.05	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Jumlah buku yang dibeli dan jumlah exemplar surat kabar Output: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 jenis bacaan 1 belanja modal	288,410,010	6 jenis surat kabar/tahun, 1 belanja modal, 4 Rak	105,170,425	5 jenis surat kabar / tahun, 1 belanja modal Buku, 1 Supporting Staff	65,524,000		Rp.	3,870,000	5	Rp.	-					5	Rp.	3,870,000	50.00	5.91	5	Rp.	109,040,425	75.00	37.81	Sekretariat DPRD	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Makan Minum sekretariat DPRD dan rumah dinas Ketua DPRD tercukupi Output: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 rutin / bulan	705,164,900	12 kl rutin/bulan	240,680,800	12 kl rutin/bulan	215,640,000	3	Rp.	-	3	Rp.	41,656,600					6	Rp.	41,656,600	25.00	19.32	3 kali rutin per bulan	Rp.	282,337,400	85.00	40.04	Sekretariat DPRD	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 127 x 100		14 = 6 x 12		15 = 145 x 100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rapat-koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Outcome : Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Output: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	713 kali	6.464.161,335	332	2.181.709,561	75 kali perj. Dinas	1.412.730,500	54	Rp. 227.271,449	50	Rp. 340.885,744					104	Rp. 568.157,193	72,00	40,22	436	Rp. 2.749.866,754	61,15	42,54	Sekretariat DPRD	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Outcome : Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Output: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.624 kali	165.342,900	574	28.533,625	330	27.830,000	45	Rp. 2.900,000	51	Rp. 3.230,000					96	Rp. 6.130,000	34,41	22,03	670	Rp. 34.663,625	60,00	20,96	Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	Outcome : Jumlah Tenaga kontrak Output: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tenaga kontark12 rutin / bulan	129.260,890	1 tenaga kontrak, 12 kali rutin/bulan	41.863,000	1 tenaga kontrak, 12 kali rutin/bulan	23.490,000	3	Rp. 1.953,500	3	Rp. 5.860,500					6	Rp. 7.814,000	50,00	33,27	1 tenaga kontrak / 12 bulan rutin / bulan	Rp. 49.677,000	85,00	38,43	Sekretariat DPRD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			44,90	26,90			74,12	38,06			
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah			
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang Kegiatan DPRD	<u>PROGRAM Peningkatan SARANA DAN PRASARANA APARATUR</u>																									
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Outcome : Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor yang dibeli	59 belanja modal	17.850,000	0	0																			100,00	100,00	Sekretariat DPRD
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Outcome : Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang dibeli Output: Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300 belanja modal	645.557,105	151 belanja bahan, 81 Belanja Modal	234.232,550	11 Belanja Modal	158.920,000	8	Rp. -	3	Rp. 140.800,000						11	Rp. 140.800,000	100,00	88,60	151 belanja bahan, 89 Belanja Modal	Rp. 375.032,550	80,00	58,09	Sekretariat DPRD	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Outcome : Kebersihan dan Keindahan Rumah Dinas Output: Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 kegiatan	380.976,970	1 Rumah Dinas	149.466,295	1 Rumah Dinas	94.452,000		Rp. 7.404,500		Rp. 30.723,200						1	Rp. 38.127,700	25,00	40,37	1 Rumah Dinas, 3 Kegiatan	Rp. 187.593,995	80,00	49,24	Sekretariat DPRD	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Outcome : Kebersihan Kantor Output: Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7 kegiatan	1.189.544,300	1 unit Gedung Kantor	489.278,635	1 unit Gedung Kantor	343.473,000		Rp. 53.843,750		Rp. 58.165,500						1	Rp. 112.009,250	50,00	32,61	1 unit gedung kantor	Rp. 601.287,885	75,00	50,55	Sekretariat DPRD	
	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara Output: Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	perawatan 20 mobil dan 11 sepeda motor	3.598.281,640	Perawatan 10 mobil dan 11 sepeda motor	1.015.587,547	Perawatan 18 mobil dan 11 sepeda motor	539.270,000				Rp. 49.104,394							Rp. 49.104,394	50,00	9,11	37 Kendaraan Dinas	Rp. 1.064.691,941	70,00	29,59	Sekretariat DPRD	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8-9+10-11		13 = 127 x 100		14 = 6 + 12		15 = 145 x 100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peneliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor	Outcome : Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Output: Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 kegiatan pemeliharaan	135,554,860	10 kegiatan pemeliharaan perlengkapan kantor	38,094,000	12 jenis peralatan	29,550,000			6	Rp. 2,145,000			6	Rp. 2,145,000	50.00	7.26	10	Rp. 40,239,000	70.00	29.68			Sekretariat DPRD
		Peneliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Outcome : Jumlah Mebeulair yang dipelihara Output: Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	27 pemeliharaan mebeulair	14,667,250	33 Pemeliharaan mebeulair	10,474,000	10 mebeulair	2,090,000	0	0	Rp. -			-	Rp. -	-	0.00	33.00	Rp. 10,474,000	100.00	71.41				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			45.83	29.66			82.14	55.51		
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah		
3.	Meningkatnya SDM Aparatur yang lebih profesional dan sistem Administrasi yang Efektif	<u>PROGRAM Peningkatan DISIPLIN APARATUR</u>																								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Outcome: jumlah pakaian dinas Output: Peningkatan Kinerja dan Keseragaman dalam berpakaian	50 orang 3 jenis pakaian, 50 orang 3 jenis pakaian dan PSL 1 Stel	885,267,500	50 orang 3 jenis pakaian	261,590,310	50 anggota 4 jenis kegiatan	322,749,000	Rp. -	-	Rp. 3,310,000						-	Rp. 3,310,000	-	1.03	50 orang 3 jenis pakaian	Rp. 264,900,310	85.00	29.92		Sekretariat DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	1.03			85.00	29.92		
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah		
4.	Meningkatnya SDM Aparatur yang lebih profesional dan sistem administrasi yang efektif	<u>PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</u>																								
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome: Jumlah Bintek yang diikuti oleh Aparatur Output: Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	65 kali pelatihan	2,652,392,000	39 kali Pelatihan	570,694,100	17 kali Pelatihan	652,850,000		3	Rp. 207,650,000						3	Rp. 207,650,000	17.65	31.81	39 kali Pelatihan	Rp. 778,344,100	60.00	29.34		Sekretariat DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)																			17.65	31.81			60.00	29.34		
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	sangat rendah		
5.	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan	<u>PROGRAM Peningkatan PENGEMANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</u>																								
	Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Outcome: Jenis Laporan Keuangan dan Kinerja yang disusun Output: Cakupan Pelaporan Keuangan dan Kinerja	3 kegiatan	58,367,820	9 Kegiatan Rutin / Tahun	10,382,475	6 Jenis Laporan	11,779,000	3,680,000		2,245,925						-	Rp. 5,925,925	83.00	50.31	6 Dokumen	Rp. 16,308,400	65.00	27.94		Sekretariat DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)																			83.00	50.31			65.00	27.94		
Predikat Kinerja																			Tinggi	Rendah			Sedang	Rendah		
6.	Terciptanya Produk Kebijakan Pemerintah yang akuntabel	<u>PROGRAM Peningkatan KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</u>																								

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 127 x 100		14 = 6 + 12		15 = 145 x 100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Outcome: Raperda yang dibahas dan ditetapkan Output: Cakupan jenis diklat yang diikuti oleh anggota Dewan, Jumlah Perda yang ditetapkan	95 Perda	2,785,441,733	45	842,065,671	16 Perda / 3 kali NA	588,626,000	3	Rp.	-	7	Rp.	-				10	Rp.	-	52,63	0,00	46 Perda, 4 NA	Rp.	842,065,671	65,00	30,23	Sekretariat DPRD
		Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD	Outcome: - Rapat DPRD yang terlaksana Output: Cakupan Jenis Diklat yang diukur oleh anggota Dewan, jumlah Perda yang ditetapkan	1.427 kali rapat	1,498,448,250	252	310,392,500	140 Rapat Rutin/ Bulan	310,392,500	31	Rp.	-	18	Rp.	-				49	Rp.	-	35,00	0,00	170	Rp.	310,392,500	75,00	60,00	Sekretariat DPRD
		Rapat Paripurna DPRD	Outcome: Rapat Paripurna DPRD Output: Cakupan jenis Diklat yang diikuti oleh anggota Dewan, jumlah Perda yang ditetapkan	105 kali rapat paripurna, 24 kali PAW	980,217,335	62	217,749,000	19 Rapat Paripurna, 2 Rapat Paripurna Kengearaan, 4 kali PAW	189,881,000	4	Rp.	-	2	Rp.	-				6	Rp.	-	20,00	0,00	75	Rp.	217,749,000	70,00	22,21	Sekretariat DPRD
		Kegiatan Reses DPRD	Outcome: jumlah penjarangan Aspirasi Masyarakat Output: Cakupan Jenis Diklat yang diikuti oleh anggota Dewan jumlah Perda yang ditetapkan	3 kali kegiatan	7,463,019,000	5 kali Kegiatan	1,969,995,200	3 kegiatan Reses, 1 kali Sosialisasi Perda	1,593,442,000	1	Rp.	247,354,800	0	Rp.	-				1	Rp.	247,354,800	25,00	15,52	3 kali kegiatan	Rp.	2,217,350,000	75,00	29,71	Sekretariat DPRD
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Outcome: jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan Output: Cakupan Jenis Diklat yang diikuti oleh anggota Dewan Jumlah Perda yang ditetapkan	1.140 kali	57,071,124,600	335	8,718,544,865	213 Kali Perj. Dinas	12,732,782,000	38	Rp.	2,584,301,225	35	Rp.	8,266,106,297				73	Rp.	10,850,407,522	34,27	85,22	408	Rp.	19,568,952,387	70,00	34,29	Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Outcome: Cakupan jenis bintek yang diikuti oleh DPPRD Output: Cakupan Jenis Diklat yang diikuti oleh anggota dewan, jumlah Perda yang ditetapkan	8 tenaga ahli, 2 tenaga ahli Banar, 1 tenaga ahli badan legislatif, 55 kl pelatihan bersama, 418 kl menghadiri undangan	23,148,387,363	50	6,730,568,595	6 Tenaga ahli Fraksi, 2Tenaga ahli Banggar, 8 kali Pelatihan Bersama, 15 kali Ketua menghadiri undangan dan 45 kali Wa-Ketua	4,649,292,000	3	Rp.	411,300,000	4	Rp.	496,629,680				7	Rp.	907,929,680	15,22	19,53	6 Fraksi 13 Pelatihan Bersama, 3 menghadiri undangan	Rp.	7,638,498,275	70,00	33,00	Sekretariat DPRD
		Pendampingan Pembahasan LKPj	Outcome: jumlah rapat Output: Cakupan jenis diklat yang diikuti oleh anggota dewan, jumlah Perda yang ditetapkan	1 kali keg 3 hari rapat	13,435,920	2 kali kegiatan 3 hari rapat	4,002,600	1 kali kegiatan 3 hari rapat	2,780,000	1	Rp.	-							1	Rp.	-	20,00	0,00	2 kali kegiatan 3 hari rapat	Rp.	4,002,600	60,00	50,00	Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kinerja Sekretariat Fraksi	Outcome: pandangan umum fraksi Output: Cakupan jenis diklat yang diikuti oleh anggota dewan, jumlah Perda yang ditetapkan	8 fraksi	100,084,000	20	51,193,150	12 kali rapat	21,065,000	2	Rp.	-	0	Rp.	-				2	Rp.	-	16,67	0,00	12 kali rapat	Rp.	51,193,150	75,00	51,15	Sekretariat DPRD
		Kajian Tunjangan Transportasi	Outcome: Jumlah Dokumen Kajian Output: Cakupan Jenis Diklat yang diikuti oleh Anggota Dewan, Jumlah Perda yang ditetapkan			1	52,192,750	-				0	Rp.	-			1	Rp.	-	1	Rp.	-	100	0,00	100		100	75,00	Sekretariat DPRD

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8-9+10-11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Kajian Tunjangan Perumahan	Outcome: Jumlah Dokumen Kajian Output: Cakupan Jenis Diklat yang diikuti oleh Anggota Dewan, Jumlah Perda yang ditetapkan	3 Dokumen	106,558,800	1	53,279,400	1 Dokumen	55,374,000	Rp. -	Rp. -	0	Rp. -			0	Rp. -		Rp. -		0.00		1	Rp. 53,279,400	66.00	50.00	Sekretariat DPRD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				28.98	10.93			66.00	39.60			
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah			
7	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang kegiatan DPRD	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN																										
		Penataan dan Pemetaan Dokumen/Arsip	Outcome: 31 Dokumen Output: Cakupan Penataan dan Pemetaan Dokumen/Arsip	1 kegiatan	56,558,400	1	22,857,150	31 Dokumen	7,579,000	5	Rp. -	15	Rp. 2,757,000	0	Rp. -	Rp. -	20	Rp. 2,757,000	64.52	36.38		1	Rp. 2,757,000	70.00	4.87	Sekretariat DPRD		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				64.52	36.38			70.00	4.87			
Predikat Kinerja																				Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Rendah			
7	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN																										
		Pengelolaan Aset	Outcome: KIB, KIR Output: Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	1 kali keg, 5 hari rapat	28,598,215	8	10,590,500	5 kali rapat	5,667,500	0	Rp. -	0	Rp. -	0	Rp. -	Rp. -		Rp. -			0.00		1	Dokumen, 1 kali kegiatan, 2 Hari Rapat	Rp. 10,590,500	70.00	37.03	Sekretariat DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			70.00	37.03			
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah			
8	Tersedianya urahan program kerja Sekretariat DPRD	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
		Penyusunan Renja SKPD	Outcome: Dokumen Renja SKPD Output: Cakupan Pelaporan Keuangan dan Kinerja	1 kegiatan 4 hari rapat	49,498,850	2	10,387,225	1 Dokumen	2,543,500	-	Rp. -		Rp. 557,000			Rp. -	Rp. 557,000	50.00	21.90		1	dokumen, 1 kegiatan 2 hari rapat	Rp. 10,944,225	70.00	22.11	Sekretariat DPRD		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50.00	21.90			70.00	22.11			
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah			
9	Meningkatnya penyebutan informasi bagi masyarakat tentang kinerja DPRD	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA																										
		Penyebutan Informasi DPRD	Outcome: Jumlah Eksemplar, Frekuensi Ekspose Output: Jumlah terbit Suarakyat, jumlah iklan	4 kali Suarakyat	4,150,003,580	4 kali Suarakyat	853,182,288	3000 cvemplar, 2 kali Suarakyat	609,597,500	-	Rp. -	1	Rp. 30,830,250			0	1	Rp. 30,830,250	4.00	5.06		4	kali Suarakyat	Rp. 884,012,538	70.00	21.30	Sekretariat DPRD	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																				4.00	5.06			70.00	21.30			
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									25,055,251,000	3,296,524,424	10,003,740,972	0	0	13,300,265,396														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 8)																				30.48	19.73			71.23	33.43			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 8)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	sangat rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan Sesuai dengan jadwal kegiatan DPRD																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Koordinasi antar bagian kurang dan pelaksanaan aplikasi keuangan baru																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam (trivulan berikutnya *):																												
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya *):																												